

Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi
 Jl. Ahmad Yani, K.M. 33,5 - Kampus STMIK Banjarbaru
 Loktabat – Banjarbaru (Tlp. 0511 4782881), e-mail: puslit.stmikbjb@gmail.com
 e-ISSN: 2685-0893
 p-ISSN: 2089-3787

***E-Leadership* Pada Sektor Publik Dan Tantangan Kepemimpinan Pada Era Dan Pasca Pandemi Covid 19 (Studi Kasus: Kota Salatiga)**

Rambu Raina W. P. W. Paranggi^{1*}, Andeka Rocky Tanaamah²
 Sistem Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
 *e-mail *Corresponding Author*: 682020064@student.uksw.edu

Abstract

The COVID-19 pandemic has accelerated the adoption of remote work and increased reliance on digital technologies, posing new challenges in leadership to maintain performance, team well-being, and data security in a virtual environment. The Covid-19 pandemic has had the impact of changes in the leadership dynamics needed to deal with global crises, including adaptation to digital technology in leading public organizations. Thus, e-leadership is the key to guiding the public sector in a more adaptive and sustainable direction in the future. This study aims to explore the role of e-leadership and leader adaptation in facing leadership challenges during and after the COVID-19 pandemic. Using a qualitative approach, this research goes through the stages of interviews, data management, and data analysis. The results show that information technology in e-leadership has proven effective in helping the public sector overcome emerging challenges during the pandemic and in the future, and is important to support public organizations towards adaptation and sustainability.

Keywords: *Digital Technology; E-leadership; Public sector*

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi kerja jarak jauh dan meningkatkan ketergantungan pada teknologi digital, menimbulkan tantangan baru dalam kepemimpinan untuk mempertahankan kinerja, kesejahteraan tim, dan keamanan data dalam lingkungan virtual. Adanya pandemi Covid-19 menimbulkan dampak perubahan dalam dinamika kepemimpinan yang diperlukan untuk menangani krisis global, termasuk adaptasi terhadap teknologi digital dalam memimpin organisasi publik. Dengan demikian, *e-leadership* menjadi kunci untuk memandu sektor publik ke arah yang lebih adaptif dan berkelanjutan di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan *e-leadership* dan adaptasi pemimpin dalam menghadapi tantangan kepemimpinan selama dan pasca-pandemi COVID-19. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melalui tahapan wawancara, pengelolaan data, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dalam *e-leadership* telah terbukti efektif dalam membantu sektor publik mengatasi tantangan yang muncul selama pandemi dan di masa mendatang, serta penting untuk mendukung organisasi publik menuju adaptasi dan keberlanjutan.

Kata Kunci: *Teknologi Digital; E-leadership; Sektor publik*

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah mengubah lanskap kepemimpinan di sektor publik secara signifikan. Selain menghadapi tantangan tradisional, pemimpin sektor publik juga dihadapkan pada tuntutan baru dalam mengelola organisasi dan masyarakat di tengah krisis global ini. Salah satu paradigma kepemimpinan yang semakin diperhatikan adalah *e-leadership*, yaitu kemampuan memimpin dan mengelola secara efektif menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). *E-leadership* menjadi semakin penting seiring dengan percepatan adopsi teknologi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam layanan publik dan administrasi pemerintahan. Namun, dalam konteks pandemi COVID-19, tantangan kepemimpinan menjadi lebih kompleks. Pemimpin tidak hanya harus mampu mengintegrasikan TIK dalam strategi dan operasional organisasi, tetapi juga harus mampu menavigasi perubahan yang cepat, tidak pasti,

dan sering kali sulit diprediksi. Dalam konteks ini, penelitian tentang *e-leadership* di sektor publik tidak hanya mengkaji bagaimana teknologi mengubah praktik kepemimpinan, tetapi juga menyoroti tantangan-tantangan unik yang dihadapi pemimpin dalam mengelola krisis seperti pandemi COVID-19. Secara khusus, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi strategi *e-leadership* yang efektif dalam mendukung adaptasi dan inovasi organisasi di masa krisis, serta bagaimana kepemimpinan harus beradaptasi dengan dinamika baru dalam konteks pasca-pandemi. Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana peran dan praktik *e-leadership* dapat membentuk masa depan kepemimpinan di sektor publik, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan tidak terduga seperti pandemi COVID-19.

Saat ini, kondisi *e-leadership* di sektor publik masih menunjukkan tingkat adopsi yang bervariasi dan sering kali terbatas, dengan banyak pemimpin menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam strategi dan operasional organisasi. Pandemi COVID-19 telah memperburuk kesenjangan ini dengan mengungkapkan kelemahan dalam kesiapan adaptasi terhadap perubahan cepat dan tidak pasti. Pemimpin juga menghadapi resistensi terhadap perubahan dan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki strategi *e-leadership* yang dapat mengelola krisis dengan lebih baik. Di masa mendatang, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam adopsi *e-leadership*, memungkinkan pemimpin untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan, dengan lebih banyak mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengintegrasikan teknologi dan memperkuat resiliensi organisasi. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memperjelas kerangka kerja *best practice* untuk *e-leadership* di sektor publik, memfasilitasi pembelajaran dan pertukaran pengetahuan yang efektif dalam menghadapi tantangan masa depan.

Dalam penyelesaian masalah *e-leadership* di sektor publik dan tantangan kepemimpinan era dan pasca pandemi COVID-19, konsep utama yang dapat diadopsi adalah integrasi yang lebih mendalam dari teknologi informasi dan komunikasi dalam praktik kepemimpinan. Ini mencakup pengembangan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi baru, pelatihan intensif untuk pemimpin dalam menggunakan TIK secara efektif, dan pengembangan infrastruktur digital yang kuat. Solusi lainnya adalah meningkatkan kolaborasi antar-lembaga dan antar-negara dalam berbagi pengalaman dan strategi *e-leadership* yang sukses, serta mempromosikan budaya organisasi yang memfasilitasi inovasi dan adaptasi cepat terhadap perubahan. Selain itu, perlu juga diperkuat kerangka kerja regulasi yang mempromosikan keamanan dan privasi data dalam penggunaan TIK, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan sektor publik dapat lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan mendukung pemimpin dalam menjalankan tugas mereka secara efektif dalam era pasca pandemi COVID-19. Pada masa pandemi salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan menerapkan aturan *Work from home* untuk mencegah penyebaran virus secara luas. Maret (2020) pemerintah Indonesia mengambil langkah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dengan cara bekerja dari rumah (*work from home*). *Work from home* adalah melaksanakan pekerjaan yang dilakukan dari rumah karyawan tersebut, sehingga tidak wajib bagi karyawan harus berangkat ke kantor [1]. Pemerintah mendorong adanya sebuah kebiasaan baru, dimana setiap proses pelayanan public disesuaikan dengan kondisi pandemic yang ada. Oleh karena itu, system kepemimpinan juga dituntut untuk mengembangkan gaya kepemimpinan berbasis elektronik (*E-Leadership*). Pemimpin yang dibutuhkan pada saat masa pandemi adalah pemimpin yang mampu beradaptasi dan mengelola perusahaan dengan baik untuk mencapai tujuan walaupun secara online [2]. Pemimpin merupakan penentu berhasil atau tidaknya suatu organisasi. oleh karena itu pemimpin harus memiliki eksistensi kepemimpinan yang baik, selain itu gaya kepemimpinan merupakan faktor penting ketika dikaitkan dengan proses kinerja manajerial organisasi. kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta tanggung jawabnya secara moral dan legal formal atas seluruh pelaksanaan wewenangnya yang telah didelegasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya [3].

Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan kajian lebih mendalam mengenai peranan *E-leadership*/sistem kepemimpinan berbasis teknologi dan peran pemimpin dalam menghadapi tantangan kepemimpinan pada era dan pasca pandemi Covid-19. Manfaatnya adalah mengetahui bagaimana peranan dan strategi *E-leadership* dalam menghadapi tantangan atau situasi krisis, meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi terhadap perubahan, peningkatan

kualitas layanan publik melalui inovasi teknologi, dan penguatan resiliensi institusi publik dalam menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dan internasional dalam pengembangan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh pemimpin sektor publik di era digital saat ini.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rochmanto dkk (2022) mengenai Pemimpin yang dibutuhkan saat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa pemimpin yang dibutuhkan pada masa pandemic adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan terhadap semua perubahan yang terjadi di masa Pandemi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pemimpin yang dibutuhkan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK pada masa Pandemi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin ideal yang dibutuhkan adalah pemimpin yang dapat beradaptasi menjadi virtual leader dengan segala keterbatasan pada masa pandemi [2]. mengacu pada pemahaman tersebut, maka dibutuhkan pemimpin yang mampu beradaptasi secara baik dalam mengelola perusahaan dimasa pandemi.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Adhitya dan Bangun (2022) mengenai kepemimpinan virtual mengatakan Kepemimpinan yang dilakukan di masa pandemi harus beradaptasi dengan lingkungan secara virtual agar semua pekerjaan tetap berjalan sesuai harapan, kepemimpinan virtual merupakan kepemimpinan yang dilakukan secara tidak langsung atau berbasis elektronik. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh pemahaman tentang pengalaman praktik pemimpin tim virtual dalam mencapai efektivitas organisasi. hasil penelitian menyatakan bahwa praktik pemimpin virtual yang paling diperhatikan oleh peserta pendidikan tinggi adalah komunikasi, keterampilan teknologi, adaptasi dan fleksibilitas, kolaborasi, kerja tim dan keterlibatan, kepercayaan dan delegasi, produksi [4].

Penelitian yang dilakukan oleh Tulungen dkk (2022) mengenai peran pemimpin dalam dunia digital mengatakan Pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang tentunya sangat membantu organisasi untuk memperoleh tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan memiliki peran yang penting dalam mewujudkan transformasi digital, Pemimpin yang memiliki kemampuan dalam memimpin dan memanfaatkan teknologi disebut pemimpin digital. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari tahu peran kepemimpinan digital dalam transformasi digital di sektor pemerintahan. Hasil penelitian menyatakan bahwa peranan kepemimpinan digital sangat krusial dalam mewujudkan transformasi digital [5]. Diharapkan dengan adanya penggunaan data besar proses pengambilan keputusan oleh pimpinan akan lebih dipermudah.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Taufik & Warsono (2020) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan birokrasi untuk New Normal, keberhasilan birokrasi di tengah New Normal pada kondisi pandemi covid 19 sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang phronesis dan visioner. dibutuhkan para ASN yang menguasai aplikasi berbasis digitalisasi serta mampu bekerja dengan baik. Disisi lain, dibutuhkan pengembangan infrastruktur berbasis digitalisasi di era pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua dimensi perubahan birokrasi, yaitu perubahan dimensi lembaga birokrasi dan perubahan dimensi sistem kerja [6]. Mengacu pada paparan di atas, maka Kepemimpinan memegang faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tengah pandemi Covid-19.

Pemahaman yang diuraikan oleh Yulianti, dkk (2022), mengenai kepemimpinan berbasis digital mengatakan Kepemimpinan digital adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada implementasi transformasi digital dalam sebuah organisasi. *Leadership*/kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang lain yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi [7]. Selanjutnya Majid (2023), mengenai pelayanan publik mengungkapkan bahwa Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga publik atau birokrasi pemerintahan yang bertugas sebagai penyedia barang dan jasa bagi masyarakat umum. Layanan publik merupakan pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat [8]. Selanjutnya Fanani (2020), mengenai kepemimpinan transformasional mengatakan bahwa Kepemimpinan sektor publik membutuhkan model kepemimpinan yang transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang memiliki visi ke depan dan mampu mengidentifikasi perubahan

lingkungan serta mampu mentransformasi perubahan tersebut ke dalam organisasi, memberikan motivasi dalam organisasi untuk kreatif dan inovatif [9].

Disisi lain, menurut Levani dkk (2021), mengenai covid-19 mengatakan Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember dunia dihebohkan dengan berita munculnya wabah pneumonia, Wabah ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan Provinsi Hubei China. Pada 7 Januari 2020 para peneliti berhasil mengidentifikasi penyebab pneumonia ini yakni jenis novel coronavirus. Secara resmi, WHO menamakan penyakit ini Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) dan nama virus tersebut adalah SARS-CoV-2 (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus*) [10]. Covid-19 (CoronaVirus) merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan. Virus corona mengakibatkan semua aktivitas manusia dikerjakan dari rumah [11]. Selanjutnya Julhadi dan Herdi (2022), mengenai penggunaan teknologi di masa pandemi mengatakan Penggunaan teknologi bukan sebagai tambahan, tetapi sebagai bantuan untuk membantu keberlangsungan kehidupan manusia di era sekarang ini yaitu era pandemi [12]. Selanjutnya, Rahman dkk (2020), menguraikan bahwa Munculnya teknologi komputer dan alat-alat komunikasi modern dapat membantu manusia untuk mengumpulkan, memproses, dan mengendalikan maklumat secara mudah dan sistematis [13]. Waedoloh dkk (2021), mengenai gaya kepemimpinan menekankan bahwa gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku, strategi atau konsep yang sering diterapkan oleh seorang pemimpin [14].

Menurut Gemma dkk (2020), mengenai Pandangan karakteristik kepemimpinan mengatakan bahwa Pemimpin terbaik dalam krisis akan menunjukkan beberapa karakter. Salah satunya adalah sikap tenang yang diperhitungkan atau "*deliberate calm*", yaitu kemampuan untuk melepaskan diri dari situasi cemas dan berpikir jernih tentang cara mengendalikan situasi tersebut [15]. Pada era digital seperti saat ini pemimpin organisasi harus mengembangkan kapasitas kepemimpinan sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat, utamanya dalam pelayanan publik [16]. Dengan demikian berdasarkan sudut pandang tata kelola teknologi informasi pada sektor publik yang diuraikan oleh Tanaamah dkk (2021) mengatakan Tata kelola Teknologi Informasi (TI) dibutuhkan di suatu organisasi pada saat ini dan menjadi perhatian utama dalam mengembangkan layanan yang berbasis Teknologi Informasi pada semua sektor publik untuk mencapai tujuan organisasi [17].

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada adaptasi kepemimpinan dan pemanfaatan teknologi informasi di masa pandemi Covid-19, maka Penelitian kali ini berfokus pada peranan *E-leadership* dalam menerapkan sistem kepemimpinan TI saat menghadapi tantangan kepemimpinan dalam sektor publik pada era dan pasca pandemi Covid-19.

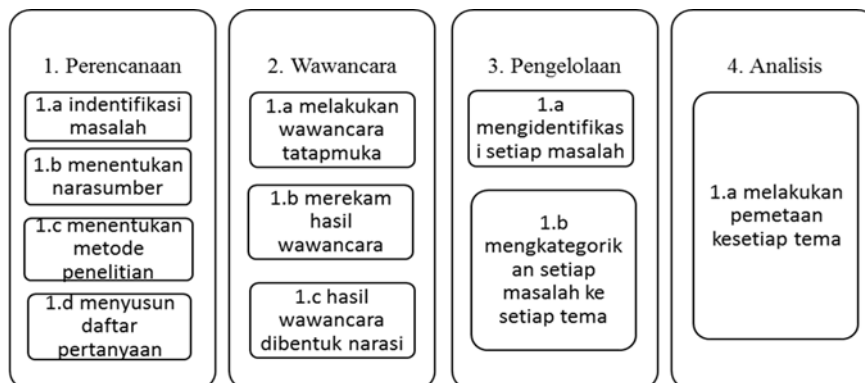
3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami dinamika kepemimpinan berbasis teknologi informasi (*e-leadership*) dalam menghadapi tantangan pelayanan pada sektor publik selama pandemi COVID-19. Tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam realitas dan tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin dalam menerapkan sistem kepemimpinan berbasis teknologi di tengah pandemi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman-pengalaman para pemimpin, memahami adaptasi sistem kepemimpinan berbasis teknologi, dan membangun sudut pandang yang komprehensif. Penelitian ini bersifat bebas nilai dan natural, memungkinkan para pemimpin untuk berbicara secara terbuka tanpa adanya intervensi dari peneliti. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat menjelaskan berbagai cara, strategi, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan berbasis teknologi selama pandemi COVID-19. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang pengalaman para pemimpin dalam menghadapi tantangan.

Adapun rencana narasumber yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Pimpinan daerah (Walikota, Bupati, Sekretaris Daerah) dan Dinas Komunikasi dan informatika (Kepala Dinas Kominfo). Alasan penentuan narasumber, berkenaan dengan kebijakan dan implementasi teknis *IT Governance*.

Adapun lokasi penelitian direncanakan yaitu Kota Salatiga, alasan pengambilan kota Salatiga sebagai lokasi penelitian disebabkan karena kota Salatiga dipandang merupakan wilayah yang lekat dengan kemajuan TI serta memiliki akses yang baik dalam infrastruktur TI

Guna mendukung penelitian dapat berjalan dengan baik, maka tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 1 Tahapan Penelitian

Mengacu pada tahapan penelitian, maka pada tahap perencanaan, penelitian ini akan melakukan identifikasi masalah berkenaan dengan:

- 1) Tantangan kepemimpinan berbasis teknologi;
- 2) Peran *E-leadership* pada sektor publik dalam menghadapi tantangan kepemimpinan di era dan pasca pandemi covid-19

Guna menjawab masalah yang ada, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan narasumber yang dipandang kompeten serta menentukan metodologi penelitian dan menyusun daftar pertanyaan.

Tahapan berikutnya adalah menggali informasi dari narasumber serta menarasikan hasil wawancara tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan pengelolaan, dimana pada tahapan ini peneliti akan melakukan identifikasi setiap masalah yang terjabar dalam hasil wawancara serta melakukan kategorisasi masalah dalam tema-tema yang dibangun. Pada akhirnya masuk dalam tahapan analisis dimana dilakukan pemetaan tema-tema tulisan. Hasil akhir dari penelitian ini adalah diperoleh informasi mengenai peranan pemimpin berkenaan dengan kepemimpinan TI.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Kota Salatiga, Jawa Tengah tepatnya di Kantor Walikota dan Dinas Komunikasi dan Informatika Salatiga. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek adalah pemerintah Kota Salatiga yang memiliki lingkup: Walikota/Sekretaris, Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, dan Kepala Bagian aplikasi dan informatika.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa temuan dari hasil yang didapatkan di lapangan, baik itu dari segi kondisi yang dihadapi maupun tindakan yang diambil sebagai langkah konkrit yang diyakini menjadi solusi atau jalan keluar dalam pelaksanaan e-Leadership di lingkungan Pemkot Salatiga.

Konsep *E-leadership* untuk sektor publik dalam menghadapi tantangan kepemimpinan di era dan pasca pandemi COVID-19 melibatkan integrasi teknologi informasi untuk memperkuat komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen kinerja organisasi. Platform digital terpadu akan mendukung pemimpin dalam memanfaatkan data real-time untuk merespons perubahan yang cepat dan mengelola transformasi digital dengan efektif. Pelatihan intensif akan diberikan kepada pemimpin untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan digital dan memahami implikasi keamanan data serta privasi dalam konteks yang semakin terhubung secara digital. Keterlibatan masyarakat akan ditingkatkan melalui platform partisipatif yang transparan, sementara evaluasi berkala akan memastikan bahwa sistem ini adaptif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan yang muncul seiring dengan evolusi dari pandemi COVID-19.

4.1 *E-leadership* di Kota Salatiga

Selama pandemi COVID-19, *e-leadership* atau kepemimpinan elektronik menjadi kunci dalam menjaga kelangsungan operasi organisasi dan membimbing tim melalui perubahan dan ketidakpastian. Di Kota Salatiga, kebijakan *work from home* (WFH) diterapkan oleh pemerintah untuk mengimbangi dampak perubahan lingkungan akibat pandemi. Kepemimpinan virtual memainkan peran penting dalam mendukung sistem WFH dengan memberikan arahan atau kebijakan dengan cepat. Pemerintah kota Salatiga memberikan jam kerja yang lebih fleksibel untuk mendukung keberlangsungan pekerjaan online atau WFH, dengan tetap mematuhi deadline yang ditetapkan.

Berikut beberapa penjelasan mengenai peran *e-leadership* di Kota Salatiga:

- 1) **Pengelolaan Tim Virtual:** Pemimpin harus mampu mengelola tim secara virtual, yang mencakup mengatur pertemuan online, mengoordinasikan proyek melalui alat kolaborasi digital, dan memastikan bahwa komunikasi antar anggota tim tetap lancar meskipun tidak bertemu secara langsung.
- 2) **Ketersediaan dan Aksesibilitas:** Pemimpin harus tetap tersedia dan mudah diakses oleh anggota tim, baik melalui email, pesan instan, atau platform komunikasi lainnya. Mereka harus responsif terhadap pertanyaan, masalah, dan kebutuhan yang muncul dari anggota tim.
- 3) **Keterampilan Komunikasi Digital:** *E-Leadership* membutuhkan keterampilan komunikasi digital yang kuat. Pemimpin harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif melalui platform digital seperti email, panggilan video, dan pesan teks.
- 4) **Kreativitas dan Inovasi:** Pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan cepat dalam cara kerja dan berbisnis. Pemimpin perlu menggunakan kreativitas dan inovasi untuk menemukan solusi baru dan adaptif dalam menghadapi tantangan yang muncul selama pandemi.
- 5) **Pemantauan Kinerja:** Meskipun bekerja dari jarak jauh, pemimpin harus tetap dapat memantau kinerja anggota tim dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Mereka harus menggunakan alat dan metrik yang tepat untuk mengukur produktivitas dan mencapai tujuan organisasi.

4.2 Kondisi yang terjadi

1) Era Pandemi

Kota Salatiga menjadi salah satu daerah yang terkena virus Covid-19. Pada Juni 2020, Kota Salatiga mengalami peningkatan kasus COVID-19, dengan 96 kasus dan penambahan setiap hari. Pemerintah kota mengambil langkah-langkah seperti melarang acara dan pertemuan, memberikan arahan untuk WFH di sektor publik, kecuali pelayanan kesehatan yang tetap berjalan dengan protokol ketat. Pasar disemprot disinfektan dan lapak pedagang diatur. Rumah sakit diminta menambah fasilitas dan ruang isolasi. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan penurunan ekonomi yang signifikan karena perubahan sistem kerja dan penutupan layanan. Pemerintah Kota Salatiga menerapkan kebijakan daring untuk semua aktivitas, termasuk pembelajaran dan pelayanan publik, untuk menjaga jarak sosial. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam menjalankan aktivitas di semua sektor, seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan pembangunan selama pandemi. Layanan internet gratis di beberapa titik Kota Salatiga disediakan untuk mendukung kelancaran aktivitas selama pandemi COVID-19.

2) Pasca Pandemi

Setelah masa pandemi COVID-19, Kota Salatiga memasuki masa endemi pada Juni 2023. Aturan *work from home* tidak wajib dilakukan, namun protokol kesehatan tetap berlaku. Pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi dengan mengizinkan sektor pelayanan publik untuk beroperasi seperti biasa. Sektor wisata, perhotelan, dan UMKM diberi arahan untuk menawarkan harga lebih murah dan diskon kepada pelanggan. Penjualan online didorong dan promosi aktif dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi kota.

Berikut beberapa kondisi yang terjadi di Salatiga pasca pandemi:

- 1) **Pemulihan Ekonomi:** Pasca pandemi, terjadi perubahan dalam aktivitas ekonomi di Salatiga. Bisnis lokal akan mengalami periode pemulihan yang bertahap setelah

- penghentian sementara selama pandemi. Penurunan pendapatan rumah tangga dan pengangguran mungkin juga masih menjadi masalah yang perlu diatasi.
- 2) Perubahan dalam Gaya Hidup: Masyarakat Salatiga akan mengadopsi perubahan dalam gaya hidup mereka, seperti meningkatnya preferensi untuk belanja secara online, kerja jarak jauh, dan lebih memperhatikan kesehatan dan kebersihan.
 - 3) Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Pandemi telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelayanan kesehatan di Salatiga. Ini bisa menghasilkan investasi lebih lanjut dalam infrastruktur kesehatan, termasuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan.
 - 4) Pendidikan dan Pembelajaran: Sektor pendidikan di Salatiga akan mengalami transformasi, dengan peningkatan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh dan pendidikan online. Institusi pendidikan mungkin juga akan fokus pada upaya pemulihan akademik dan sosial siswa yang terdampak pandemi.
 - 5) Pariwisata dan Industri Kreatif: Sektor pariwisata dan industri kreatif di Salatiga membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih karena dampak pandemi yang signifikan terhadap perjalanan dan kegiatan sosial. Namun, dengan langkah-langkah pemulihan yang tepat, sektor ini dapat menjadi salah satu sektor utama dalam menggerakkan ekonomi lokal.
 - 6) Kesiapan terhadap Tantangan Masa Depan: Pasca pandemi, Salatiga akan memperkuat kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan masa depan, baik itu berupa krisis kesehatan yang mungkin terjadi kembali atau tantangan lainnya seperti perubahan iklim.

4.3 Tantangan yang dihadapi Kota Salatiga

Tantangan yang dihadapi pimpinan Kota Salatiga pada saat pandemi adalah penurunan tingkat kesehatan masyarakat, krisis perekonomian dan penyalahgunaan teknologi. Selain itu banyak masyarakat yang bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah karena harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Pada saat pandemi mulai menurun dan memasuki masa pasca pandemi, pimpinan masih diperhadapkan dengan tantangan yaitu pemulihan perekonomian yang menurun akibat adanya Covid-19.

Pimpinan kota Salatiga menghadapi beberapa tantangan yang signifikan selama dan pasca pandemi COVID-19. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- 1) Manajemen Krisis Kesehatan: Selama pandemi, salah satu tantangan utama adalah mengelola penyebaran virus COVID-19 di Salatiga. Pemerintah kota harus memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, koordinasi dengan rumah sakit dan fasilitas medis lainnya, serta menyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat.
- 2) Pengaturan Pembatasan Sosial: Pemerintah kota Salatiga perlu mengambil keputusan sulit terkait pembatasan sosial, penutupan tempat umum, dan kebijakan *lockdown* untuk memperlambat penyebaran virus. Tantangan ini melibatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan nasional, serta memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan tersebut.
- 3) Dampak Ekonomi: Pasca pandemi, pimpinan kota Salatiga menghadapi tantangan besar dalam memulihkan ekonomi lokal. Banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) terdampak berat, sehingga perlu adanya kebijakan stimulus ekonomi, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan insentif untuk mendorong investasi.
- 4) Pendidikan dan Pembelajaran: Sektor pendidikan mengalami transformasi besar selama pandemi. Pemerintah kota Salatiga harus mengatasi tantangan dalam memastikan akses pendidikan jarak jauh yang setara bagi semua siswa, menyediakan infrastruktur digital yang memadai, dan memastikan keamanan dan kesehatan siswa serta pendidik.
- 5) Psikologis dan Sosial: Pandemi COVID-19 telah meningkatkan tingkat kecemasan dan isolasi sosial di masyarakat. Pimpinan kota Salatiga perlu memperkuat sistem dukungan mental dan sosial, termasuk layanan kesehatan mental dan program-program komunitas yang mendukung kesejahteraan psikologis.
- 6) Perencanaan Kota dan Tata Ruang: Pandemi telah mengubah cara masyarakat menggunakan ruang publik dan perumahan. Pemerintah kota Salatiga perlu menyesuaikan rencana tata ruang dan transportasi untuk mendukung pola hidup baru, seperti bekerja dari rumah dan penggunaan transportasi pribadi.

- 7) Pemulihan Lingkungan: Meskipun pandemi memiliki dampak negatif, juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Pimpinan kota Salatiga perlu mempertimbangkan keberlanjutan dalam rencana pemulihan ekonomi dan sosial, termasuk kebijakan hijau dan perlindungan lingkungan.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan kompleksitas yang dihadapi oleh pimpinan kota Salatiga dalam mengelola dampak pandemi COVID-19 secara menyeluruh, baik dalam aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Solusi yang efektif memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk membangun kembali dan memperkuat ketahanan kota.

4.4 Peran pemimpin dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan kepemimpinan di era covid 19 di Kota Salatiga

Pemerintah Kota Salatiga telah menerapkan berbagai strategi untuk menghambat penambahan kasus COVID-19. Ini termasuk pembatasan aktivitas di lingkungan pekerjaan di sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, dan pembangunan. Meskipun butuh penyesuaian, kebijakan tersebut diterima dan dijalankan oleh semua elemen pimpinan. Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk memberikan Wifi gratis di beberapa titik kota Salatiga membantu mendukung aktivitas dengan *Work From Home (WFH)*, dan memastikan kelancaran operasional. Maka dari itu, penerapan aturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi situasi di lingkup pemerintahan pada masa pandemi virus Covid-19 adalah tepat. Hal ini dilihat dari kesiapan dan ketersediaan semua pimpinan dalam menjalankan aturan yang ada. Peran pemimpin dalam sektor publik saat menghadapi tantangan selama pandemi Covid-19 sangatlah penting. Pemimpin dalam sektor publik memiliki tanggung jawab besar dalam menghadapi tantangan selama pandemi. Kepemimpinan yang efektif dan responsif sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta pemulihan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Berikut beberapa peran yang dijalankan pemimpin pada sektor publik di Kota Salatiga:

- 1) Pengambilan Keputusan: Pemimpin dalam sektor publik bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang cepat dan efektif dalam menangani krisis Covid-19. Mereka harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesehatan masyarakat, ekonomi, dan aspek sosial dalam membuat keputusan yang tepat untuk kepentingan umum (pemimpin memiliki kewenangan untuk memberikan kebijakan dalam mencegah penularan virus Covid-19).
- 2) Komunikasi yang Jelas dan Transparan: Pemimpin harus mampu menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan kepada masyarakat tentang situasi Covid-19, kebijakan pemerintah, langkah-langkah yang diambil, serta tindakan yang harus diambil oleh masyarakat. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi kepanikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (pemimpin dituntut agar mampu memberikan informasi yang baik dan benar pada semua sektor publik).
- 3) Koordinasi antar instansi: Pemimpin dalam sektor publik harus mampu mengkoordinasikan berbagai instansi dan lembaga pemerintah, serta melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil, untuk bekerja sama dalam menangani pandemi. Kolaborasi yang baik antarinstansi sangat penting untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efisien (pemimpin harus mampu berkoordinasi dengan semua sektor publik dalam proses penanganan kasus covid-19).
- 4) Pengelolaan Sumber Daya: Pemimpin perlu mengelola sumber daya yang terbatas dengan bijaksana untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan memiliki cukup peralatan medis, tenaga kesehatan, dan fasilitas yang diperlukan untuk merawat pasien Covid-19. Mereka juga harus memastikan distribusi yang adil dan tepat waktu dari bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak (pemimpin harus mampu dan bijak dalam pengelolaan sumber daya agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi).
- 5) Pembuatan Kebijakan yang Adaptif: Situasi Covid-19 terus berubah, dan pemimpin harus dapat menyesuaikan kebijakan dan strategi mereka sesuai dengan

perkembangan terbaru dari pandemi. Mereka harus tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan situasi serta memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat (pemimpin harus bisa memberikan kebijakan dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi).

4.5 Peraturan Daerah Kota Salatiga dalam penanganan kondisi selama adanya Covid-19

Pemerintah daerah Kota Salatiga tentunya harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. Selain itu Pemerintah Kota Salatiga berhak mengeluarkan kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah untuk menanggulangi pandemi Covid-19, kebijakan yang dikeluarkan harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat atau tidak keluar jalur dari batasan-batasan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Berikut aturan dan edaran yang dikeluarkan Pemerintah daerah kota salatiga:

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 2);

Berdasarkan perkembangan dalam kurun waktu empat tahun semenjak masa covid, terdapat aspek-aspek pada sektor publik yang menjadi prioritas pemerintah kota salatiga. Adapun aspek-aspek tersebut yakni penyediaan layanan internet, aturan WFH, Prokes, dan lain-lain (Tabel 1). Dari masing-masing aspek yang ada, kemudian dirumuskan pada setiap sektor publik untuk diterapkan (Tabel 2). Dilihat dari masing-masing sektor yang ada, terdapat beberapa aspek yang diterapkan di masa covid 19 dan dipertahankan di masa pasca covid19. aspek-aspek yang dipertahankan tersebut antara lain: penyediaan layanan internet, peningkatan layanan kesehatan, bantuan ekonomi, penggunaan teknologi, pendanaan penelitian dan pengembangan, serta kolaborasi internasional.

Tabel 1. Aspek-aspek pada Sektor Publik

Kode	Aspek	Keterangan
A1	Penyediaan Layanan Internet	Peraturan walikota salatiga nomor 10 tahun 2020 Tentang pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan (COVID-19). (peraturan daerah nomor 1 pasal 10 tentang memfasilitasi penyediaan jaring pengaman sosial melalui pendataan dan penyaluran bantuan sosial di wilayah administratif Kecamatan bersangkutan).
A2	Aturan WFH	Peraturan walikota salatiga nomor 10 tahun 2020 Tentang pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan (COVID-19). (peraturan daerah Work from home (WFH) atau bekerja di rumah di tengah wabah corona dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), di mana setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja
A3	Prokes	Peraturan walikota salatiga nomor 10 tahun 2020 Tentang pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan (COVID-19). (peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020. Pemberlakuan PSBB ini juga berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
A4	Pembatasan Sosial	Peraturan walikota salatiga nomor 10 tahun 2020 Tentang pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan (COVID-19). (peraturan daerah pasal 4 mengenai pelaksanaan kegiatan dengan menghindari bentuk pertemuan/tatap muka langsung).
A5	Peningkatan Layanan Kesehatan	Peraturan walikota salatiga nomor 10 tahun 2020 Tentang pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan (COVID-19). (peraturan daerah nomor 1 pasal 4 tentang peningkatan dan penanganan kesehatan). dan peraturan daerah nomor 4 pasal 11 mengenai Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang difokuskan pada kegiatan penyediaan sarana prasarana kesehatan, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan/medis yang potensial.
A6	Bantuan Ekonomi	Peraturan walikota salatiga nomor 10 tahun 2020 Tentang pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan (COVID-19). (Peraturan daerah pasal 1 nomor 6 mengenai Bantuan Sosial bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial).

Kode Aspek	Keterangan
A7 Sosialisasi kesadaran masyarakat	Peraturan walikota salatiga nomor 10 tahun 2020 Tentang pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan (COVID-19). (peraturan daerah nomor 6 pasal 4 mengenai meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi)
A8 Penggunaan Teknologi	Peraturan walikota salatiga nomor 10 tahun 2020 Tentang pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan (covid-19) (peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2019 pasal 2 tentang penyelenggaraan sistem elektronik)
A9 Pendanaan Penelitian dan Pengembangan	Peraturan walikota salatiga nomor 10 tahun 2020 Tentang pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan (COVID-19). (peraturan daerah nomor 2 pasal 4 mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran (realokasi) yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas).
A10 Peraturan dan Penegakan Hukum	Peraturan walikota salatiga nomor 10 tahun 2020 Tentang pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan (COVID-19). (Peraturan daerah nomor 1 pasal 2 tentang Peraturan Wali Kota ini sebagai landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan mendasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi)
A11 Kolaborasi Internasional	Peraturan walikota salatiga nomor 10 tahun 2020 Tentang pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan (COVID-19). (peraturan daerah nomor 9 pasal 1 mengenai Mitra kerja untuk untuk mencapai tujuan).

Tabel 2. Matriks Perkembangan Pada Masing-Masing Sektor Publik.

Tahun	Pendidikan	kesehatan	perekonomian	Sosial
2020	A1	A1	A1	A1
	A2	A3	A2	A2
	A3		A3	A3
	A4	A4	A4	A4
		A5		

Tahun	Pendidikan	kesehatan	perekonomian	Sosial
			A6	A6
	A8	A8	A8	A8
	A9	A9	A9	A9
	A10	A10	A10	A10
		A11	A11	A11
2021	A1	A1	A1	A1
	A2	A3	A2	A2
	A3		A3	A3
	A4	A4	A4	A4
		A5		
			A6	A6
	A7	A7	A7	A7
	A8	A8	A8	A8
	A9	A9	A9	A9
	A10	A10	A10	A10
		A11	A11	A11
2022	A1	A1	A1	A1
	A5	A5	A5	A5
	A6	A6	A6	A6
	A9	A9	A9	A9
	A10	A10	A10	A10
	A11	A11	A11	A11
2023	A1	A1	A1	A1
	A5	A5	A5	A5

Tahun	Pendidikan	kesehatan	perekonomian	Sosial
	A6	A6	A6	A6
	A9	A9	A9	A9
	A10	A10	A10	A10
	A11	A11	A11	A11

Berikut penjelasan aspek-aspek pada sektor publik pada tahun 2020-2023 yang menjadi prioritas pemerintah kota salatiga:

- A 1. Aturan WFH: Kebijakan yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari lokasi yang berbeda dari kantor pusat perusahaan, biasanya dari rumah mereka sendiri atau dari lokasi lain yang memungkinkan akses internet dan infrastruktur kerja yang diperlukan (melakukan aktivitas dari rumah atau dari mana saja secara online).
- A 2. Pembatasan sosial: Pemerintah menerapkan pembatasan pergerakan dan interaksi sosial untuk mengurangi penyebaran virus, seperti *lockdown*, jam malam, dan pembatasan kapasitas di tempat-tempat umum (tidak mengadakan dan menghadiri kerumunan).
- A 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Fokus diberikan pada peningkatan kapasitas sistem kesehatan, termasuk penambahan tempat tidur di rumah sakit, pengadaan peralatan medis dan perlindungan bagi petugas kesehatan (penambahan dan pengelolaan fasilitas kesehatan).
- A 4. Sosialisasi Kesadaran Masyarakat: Pemerintah melakukan sosialisasi edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak fisik (memberikan informasi dan masukan pada masyarakat untuk mentaati prokes).
- A 5. Bantuan Ekonomi: Program bantuan ekonomi diluncurkan untuk membantu individu dan bisnis yang terdampak, termasuk subsidi pengangguran, bantuan langsung, dan insentif fiskal bagi industri tertentu (pemerintah memberikan bantuan ekonomi bagi yang mengalami krisis ekonomi akibat Covid-19)
- A 6. Penggunaan Teknologi: Teknologi digunakan untuk mendukung upaya penanganan pandemi, seperti aplikasi pelacakan kontak, sistem reservasi online untuk layanan publik, dan telemedicine (menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah aktivitas sehari-hari).
- A 7. Pendanaan Penelitian dan Pengembangan: Dana dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan vaksin, obat-obatan, dan teknologi lainnya yang relevan dengan penanggulangan COVID-19 (menggunakan dana untuk mendukung penanganan kasus covid-19 dan melakukan pengemangan kebutuhan).
- A 8. Penyediaan layanan internet: pemerintah memberikan bantuan dengan menyediakan layanan internet guna memperlancar semua aktivitas kerja (penyediaan layanan internet digunakan untuk membantu memperlancar pekerjaan, internet digunakan dengan baik dan bijak).
- A 9. Kolaborasi Internasional: Kerja sama antar negara dilakukan dalam hal pertukaran informasi, sumber daya medis, dan pengalaman dalam menangani pandemi (melakukan kolaborasi antar negara dalam penanganan situasi darurat).
- A 10. Peraturan dan Penegakan Hukum: Penerapan peraturan dan penegakan hukum dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan pembatasan yang telah ditetapkan (penerapan aturan dan penegakan hukum dalam mendukung pelaksanaan semua kebijakan pemerintah).
- A 11. Protocol kesehatan: penerapan aturan agar menaati prokes seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menggunakan handziteser (menaati protocol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19).

Pada masa pasca Covid-19, penggunaan teknologi informasi akan terus berkembang dan mengalami transformasi yang signifikan. Untuk penggunaan teknologi informasi di Kota Salatiga dari saat pandemi sampai sekarang tetap berjalan, hal ini dilihat dari manfaat teknologi yang sangat baik bagi kelancaran aktivitas kerja maka penggunaan teknologi informasi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan adanya sistem penggunaan teknologi informasi maka sistem Kepemimpinan virtual tetap berlangsung guna meningkatkan efektifitas dan mempercepat proses kerja semua bidang pekerjaan.

Berikut beberapa penjelasan tentang manfaat teknologi informasi yang digunakan setelah pandemi:

- 1) Perubahan dalam Cara Kerja: Pengalaman bekerja dari jarak jauh (*remote work*) yang dipercepat selama pandemi akan tetap ada setelahnya. Banyak perusahaan telah menyadari manfaat produktivitas dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh kerja jarak jauh. Teknologi seperti aplikasi konferensi video, alat kolaborasi online, dan platform manajemen proyek akan terus digunakan untuk mendukung model kerja jarak jauh.
- 2) Pendidikan Jarak Jauh yang Lebih Terintegrasi: Sektor pendidikan telah mengadopsi pembelajaran jarak jauh dengan cepat selama pandemi. Setelahnya, teknologi informasi akan digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar, mengintegrasikan pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka, dan memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas.
- 3) Perubahan dalam Layanan Kesehatan: Layanan kesehatan digital akan terus berkembang setelah pandemi. Pasien akan lebih mengandalkan teknologi untuk konsultasi dokter jarak jauh, pemantauan kesehatan, dan manajemen penyakit. Teknologi seperti aplikasi kesehatan, perangkat pemantauan, dan platform kesehatan online akan menjadi bagian integral dari sistem perawatan kesehatan.
- 4) Pengembangan Bisnis *Online*: Selama pandemi, banyak bisnis beralih ke platform online untuk menjual produk dan layanan mereka. Setelahnya, penggunaan teknologi informasi dalam e-commerce, pemasaran digital, dan analitika data akan terus berkembang. Bisnis akan terus memanfaatkan platform online untuk mencapai pasar yang lebih luas dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan.
- 5) Koneksi dan Komunikasi yang Lebih Terhubung: *Internet of Things* (IoT) akan terus memperluas jaringan perangkat yang terhubung. Rumah pintar, kota pintar, dan lingkungan yang terhubung akan menjadi lebih umum, memungkinkan koneksi yang lebih baik antara individu, perangkat, dan infrastruktur.

Penelitian mengenai *e-leadership* pada sektor publik di era dan pasca pandemi menggambarkan sebuah lanskap yang berubah secara signifikan dalam paradigma kepemimpinan. Dalam konteks ini, *e-leadership* telah muncul sebagai sebuah konsep yang esensial, menuntut pemimpin untuk memiliki keterampilan yang lebih luas, termasuk pemahaman mendalam tentang teknologi, kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang cepat, dan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan koneksi manusiawi dalam lingkungan virtual. Pandemi COVID-19 mempercepat transformasi ini dengan memaksa organisasi untuk beralih ke kerja jarak jauh dan bergantung pada teknologi digital untuk menjaga produktivitas dan keterhubungan tim. Tantangan yang dihadapi pemimpin di era dan pasca pandemi mencakup memastikan kesejahteraan dan kinerja tim dalam konteks kerja jarak jauh, menjaga keamanan data dalam lingkungan digital yang semakin rentan, dan mengelola kelelahan digital yang mungkin timbul akibat peningkatan penggunaan teknologi. Penelitian ini menyoroti perlunya adaptasi organisasi dan pengembangan kebijakan yang mendukung transformasi *e-leadership*, sambil mempertimbangkan tantangan yang terkait dengan kesenjangan digital dan keamanan *cyber*. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang *e-leadership* dan tantangan kepemimpinan yang dihadapi di era dan pasca pandemi menjadi kunci untuk memandu perkembangan organisasi publik ke arah yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam era digital ini.

Selama penanganan COVID-19, pemerintah Kota Salatiga telah menerapkan berbagai kebijakan spesifik untuk mengendalikan penyebaran virus. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah pembatasan sosial yang ketat, termasuk pembatasan kapasitas di tempat-tempat umum seperti restoran, toko, dan tempat ibadah, serta pengaturan jam operasional untuk mengurangi kerumunan. Penggunaan masker wajib juga diimplementasikan di tempat-tempat umum untuk memastikan perlindungan individu dan mengurangi risiko penularan.

Pemerintah Kota Salatiga juga aktif dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk meningkatkan kapasitas rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan yang diperlukan. Selain itu, kampanye edukasi secara massal dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan, vaksinasi, dan langkah-langkah pencegahan lainnya. Kebijakan kerja dari rumah juga diperkenalkan untuk mengurangi risiko penularan di tempat kerja. Langkah-langkah ini diarahkan untuk meminimalkan risiko penyebaran virus di Kota Salatiga selama masa pandemi COVID-19.

Salah satu warisan kebijakan selama pandemi COVID-19 yang tetap dilakukan hingga saat ini adalah penggunaan teknologi dan protocol kebersihan lingkungan yang ketat. Kebijakan ini tetap diterapkan sebagai langkah penting dalam memperlancar aktivitas kerja sehari-hari dan mencegah penyebaran penyakit demi kesejahteraan lingkungan. Semua dihimbau agar tetap menjaga kebersihan seperti mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir serta membersihkan permukaan yang sering disentuh. Kebijakan ini tidak hanya efektif dalam mengendalikan penyebaran COVID-19, tetapi juga membantu mencegah penyakit lainnya. Selain itu pemerintah terus melakukan kampanye Edukasi masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan, vaksinasi, dan langkah-langkah pencegahan lainnya juga terus diberikan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menanggulangi dan menghadapi tantangan serupa di masa depan.

5. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *e-leadership* dalam sektor publik di era dan pasca pandemi COVID-19 telah membuktikan nilai strategis teknologi informasi dalam memimpin secara efektif. Dalam situasi yang cepat berubah seperti pandemi, pemimpin sektor publik menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelangsungan layanan publik sambil memastikan keselamatan masyarakat dan staf mereka. *E-leadership*, yang melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengelola dan memimpin, telah membantu menyediakan solusi untuk tantangan tersebut. Penerapan *e-leadership* telah membuktikan bahwa teknologi informasi dapat menjadi alat yang kuat dalam mendukung kepemimpinan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada data. Dengan sistem kepemimpinan digital, pemimpin dapat dengan mudah mengakses informasi dan mengeluarkan kebijakan baru selama pandemi berlangsung. Pemanfaatan teknologi informasi telah membantu memfasilitasi kelancaran aktivitas sehari-hari selama masa pandemi, meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas yang diperlukan.

Oleh karena itu, kesimpulan utama adalah bahwa penggunaan teknologi informasi dalam *e-leadership* telah membuktikan nilainya sebagai salah satu jalan utama untuk membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor publik selama dan pasca pandemi COVID-19. Dengan terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, pemimpin dapat memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan dengan lancar, sambil menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memperkuat adaptasi organisasi terhadap perubahan yang cepat. Untuk menghadapi tantangan ini, disarankan agar organisasi publik fokus pada penguatan keterampilan *e-leadership* melalui pelatihan yang terarah pada literasi teknologi, keterampilan manajemen virtual dan pengembangan sistem digital guna mendukung kerja jarak jauh dan kolaborasi virtual. Selain itu, perlu disusun kebijakan yang fleksibel untuk mengakomodasi kerja jarak jauh dan memastikan keamanan data dalam lingkungan digital.

Daftar Referensi

- [1] W. Ramadan and Y. Firmansyah, "Gaya Kepemimpinan Era Covid-19: Transaksional dan Transformasional Serta Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Work from Home (Studi Pada Karyawan WFH di Bandung)," in *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 2021, vol. 12, pp. 1597–1604.
- [2] R. Nuryadin, A. Sobandi, & B. Santoso, "Digital Leadership in the Public Sector-Systematic Literature Review: Systematic literature review. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, vol. 20, no. 1, pp. 90-106, 2023.

- [3] I. Kurniawan, "Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Diantara Krisis Pandemi Covid-19 Dan Digital Disruption," *J. Kaji. Pemerintah J. Gov. Soc. Polit.*, vol. 8, no. 2, pp. 29–40, 2022, doi: 10.25299/jkp.2022.vol8(2).9776.
- [4] W. B. Doni Priza Adhitya, "Kepemimpinan Tim Virtual Dalam Pencapaian Efektivitas Organisasi Fakultas Bisnis / Magister Manajemen, Maranatha Christian University," vol. 11, pp. 219–232, 2022.
- [5] E. E. W. Tulungen, D. P. E. Saerang, and J. B. Maramis, "Transformasi Digital: Peran Kepemimpinan Digital," *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 10, no. 2, pp. 1116-1123 2022.
- [6] T. Taufik and H. Warsono, "Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19," *Dialogue J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 1–18, 2020, doi: 10.14710/dialogue.v2i1.8182.
- [7] S. Purwoko, A. Rokhman, and Tobirin, "E-Leadership: The Concept and Effect Of Digital Leadership In Digital Transformation In The Government Sector," *Recent Advances in Science ans...t.r.*, Vol. 5, no. October 2022, pp. 170–181, 2022, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/367524210>.
- [8] U. Hasdiana, *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title, Analytical Biochemistry*, vol. 11, no. 1. pp. 1-5, 2018.
- [9] A. F. Fanani, M. M. Iqbal, W. Astutik, and Y. Lestari, "Kepemimpinan Transformasional Sektor Publik," *JPSI (Journal Public Sect. Innov.*, vol. 4, no. 2, p. 84, 2020, doi: 10.26740/jpsi.v4n2.p84-90.
- [10] Y. Levani, A. D. Prastya, and S. Mawaddatunnadila, "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi," *J. Kedokt. dan Kesehat.*, vol. 17, no. 1, pp. 44-53, 2021, doi: 10.24853/jkk.17.1.44-57.
- [11] R.O. Asy'ari, "Makalah Bahasa Indonesia Pengertian Covid-19 Dan Bentuk Partisipasi Dalam Memerangi Nya," *Makal. covid 19*, no. May, p. 3, 2020, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/341096752_Makalah_Bahasa_Indonesia_Pengertian_Covid19_Dan_Bentuk_Partisipasi_Dalam_Memeranginya.
- [12] J. Julhadi and H. Herdi, "Penggunaan teknologi di era pandemi Covid-19: A systematic literatur review," *Ter. J. Bimbing. dan Konseling*, vol. 6, no. 1, pp. 104–110, 2022, doi: 10.26539/terapeutik.611003.
- [13] N.S.A. Rahman, Z.F.M. Zolkifli, and Y.L. Ling, "Kepentingan Kemudahan Teknologi dan Motivasi Membentuk Kesedaran Pelajar dalam Pembelajaran Digital," <https://www.researchgate.net/publication/3447810009>, no. October, pp. 1–14, 2020.
- [14] H. Waedoloh, H. Purwanta, and S. Ediyono, "Gaya Kepemimpinan dan Karakteristik Pemimpin yang Efektif," *Soc. Humanit. Educ. Stud. Conf. Ser.*, vol. 5, no. 1, pp. 144-152, 2022, doi: 10.20961/shes.v5i1.57783.
- [15] G. D. Auria and A. D. Smet, "Kepemimpinan di Masa Krisis: Menghadapi Wabah Virus Corona dan Tantangan di Masa Depan," *Mckinsey.com*, vol. 34, no. 1, pp. 4–10, 2020, [Online]. Available: https://www.mckinsey.com/id/~/_media/mckinsey/locations/asia/indonesia/our_insights/leadership_in_a_crisis_responding_to_the_coronavirus_outbreak_and_future_challenges/leadership-in-a-crisis-responding-to-the-coronavirus-outbreak.pdf.

-
- [16] F. D. Cahyarini, "Implementasi Digital Leadership dalam Pengembangan Kompetensi Digital pada Pelayanan Publik," *J. Stud. Komun. dan Media*, vol. 25, no. 1, pp. 47-55, 2021, doi: 10.31445/jskm.2021.3780.
- [17] A. R. Tanaamah, A. F. Wijaya, S. A. Maylinda, "Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Sektor Publik: Penyelarasan Teknologi Informasi Dengan Visi Kepemimpinan (Studi Kasus: Kota Salatiga Dan Kabupaten Bengkayang) Information Technology Governance in the Public Sector: Information Technology Alignment Wi," *Jtiik*, vol. 8, no. 6, pp. 1319–1330, 2021, doi: 10.25126/jtiik.202185379.